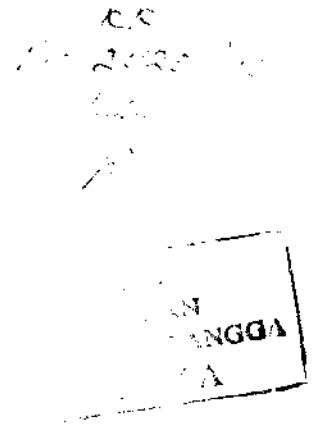


SKRIPSI

IWAN CHANDRA NUGRAHA

PENGUNAAN CREDIT CARD DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA



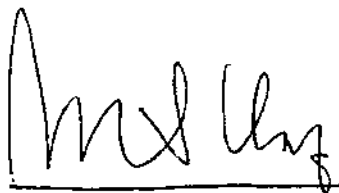
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

PENGUNAAN CREDIT CARD DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

SKRIPSI

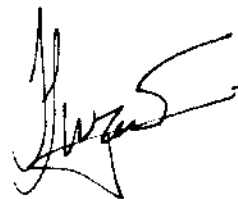
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Hj. Moerdiati, S.H., MS.
NIP. 130287031

Penyusun,



Iwan Chandra Nugraha
NIM. 039413989

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prosedur bisnis yang rumit ditambah dengan lemahnya infrastruktur dalam masyarakat, seperti perangkat hukum dan kelembagaan yang memadai membuat bisnis jasa melalui credit card masih mengandung banyak resiko yang rawan sehingga dalam pelaksanaannya timbul penyimpangan-penyimpangan. Upaya yang dilakukan oleh Issuer untuk mengatasi berbagai penyimpangan, baik yang dilakukan oleh card holder maupun oleh merchant adalah pertama, pihak issuer masih melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan intern antara issuer dengan merchant atau issuer dengan card holder. Penyelesaian tersebut telah diatur baik dalam Perjanjian Kartu Kredit maupun Perjanjian Usahawan. Kedua, apabila penyelesaian secara kekeluargaan atau intern tidak berhasil maka diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan atas wanprestasinya merchant ataupun card holder.
- b. Perlindungan hukum bagi merchant dalam hal penolakan pencairan sales draft diluar kesalahan merchant yang disebabkan adanya keterlambatan penyampaian informasi credit card yang masuk dalam daftar hitam. Dalam hal ini merchant berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penolakan pencairan sales draft berdasarkan pasal 1239 jo 1339 KUH Perdata. Sedangkan perlindungan hukum bagi card holder dalam hal hilangnya credit card adalah pertama, Issuer akan menblack list credit card yang hilang. Kedua,

memberikan kesempatan pada card holder untuk melaksanakan haknya dengan mengeluarkan credit card yang baru sebagai pengganti credit card yang hilang.

2. Saran

- a. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan credit card di masa yang akan datang, perlu ditinjau lagi penggunaan peralatan dan sistem operasionalisasi serta segi fisik credit card itu sendiri. Oleh karena itu pihak penerbit credit card harus terus menerus mencari cara-cara baru untuk mengamankan credit card, sebab penyimpangan dan kejahatan selalu datang bersamaan dengan kemajuan perekonomian dan teknologi.
- b. Perlu ditingkatkan koordinasi antara bank (issuer), penegak hukum, merchant dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI). Karena selama ini AKKI belum banyak berperan dalam menghadapi penyimpangan dan tindak kejahatan credit card yang merugikan anggotanya. Keberadaannya masih terbatas sekedar fungsi administrasi. Demikian pula ada baiknya merchant juga membentuk suatu asosiasi, karena saat ini merchant masih berjalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan kesulitannya. Dengan adanya sebuah asosiasi, merchant dapat bersama-sama melindungi kepentingannya.